

# POLA REKRUTMEN KEPALA DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) PADA PILKADA TAHUN 2015 DI KABUPATEN KETAPANG

Oleh:  
**OSKAR IRWANDI**  
NIM. E02112021

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email: [oskarirwandi@gmail.com](mailto:oskarirwandi@gmail.com)

## Abstrak

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa indikator pola rekrutmen dan mekanisme penjangkaran calon kepala daerah di DPC PDI-P Kabupaten Ketapang tahun 2015. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini pola yang dilakukan partai dalam perekrutan calon kepala daerah. Indikator dalam penelitian ini yaitu; pada proses penjangkaran, penyaringan, dan penetapan calon kepala daerah. Teori yang digunakan adalah mekanisme rekrutmen Rush dan Althoff yaitu; terbuka dan tertutup, metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah partai yang bersifat terbuka dan tertutup dimana dari proses penjangkaran dilakukan terbuka, selanjutnya penyaringan dan penetapan dilakukan tertutup oleh pengurus DPD dan DPP.

Kata-kata Kunci: Pola Rekrutmen, Rekrutmen Terbuka, Rekrutmen Tertutup,

## Abstract

This undergraduate thesis aims to analyze the indicators of recruitment patterns and mechanisms for screening of prospective regional heads in the branch of PDI-P Ketapang 2015. The problem of this research the pattern of recruitment of prospective regional heads. Indicators in this study are in the process of screening, vetting and determination of prospective regional heads. The theory used is the recruitment mechanisms by Rush and Althoff namely: open and closed; the method used in this research is qualitative descriptive. This research finding show that the Indonesia Democratic Party of Struggle (PDI-P) is a party that is open and at the same time closed in which the process of screening is done openly, then the vetting and determination is done in a closed meeting by the Central Executive Board (DPP) and the Regional Executive Board (DPD) officials.

Keywords: Recruitment Pattern, Open Recruitment, Closed Recruitment.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Sejak era reformasi peranan partai politik semakin *urgan* (penting) dalam

sistem politik Indonesia sebagai negara demokrasi mempunyai peran penting menjadi penghubung yang sangat strategis antara pemerintahan dengan warga negara. Berfungsi mengisi jabatan-jabatan penting

dalam pemerintahan eksekutif, legislatif dan yudikatif dari tingkat daerah maupun di tingkat pusat, untuk mengisi jabatan ini partai perlu melakukan rekrutmen terhadap kader partai.

Brice dalam (Richard.S,2014:7) demokrasi modern tidak dapat dibayangkan tanpa partai, lahirnya partai politik di tengah masyarakat sebagai sebuah keharusan dalam kehidupan politik sebagai organisasi politik yang merupakan sarana untuk mengaktifkan dan memobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengelolaan negara. Idealnya menurut Almond dan Coleman partisipasi dalam sektor pemerintahan adalah mendukung orang-orang yang menjadi pejabat, sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik atau output pada umumnya (Kantaprawira, 2004:15). Bisa dikatakan partai politiklah menjadi penentu kemajuan demokrasi suatu negara karena semakin besar peranan dan fungsi partai politik akan semakin berkualitasnya demokrasi.

Rekrutmen merupakan salah satu fungsi partai memegang peranan penting karena menjadi penjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus mencari para calon pemimpin yang melanjutkan fungsi-fungsi sistem politik. Kemajuan dan keberhasilan partai politik pada pemilu dan

diparlemen itu semua tergantung pada kemampuan partai politik dalam melakukan fungsi rekrutmen politik akan menghasilkan orang-orang yang mampu menjalankan sistem pemerintahan atau sebaliknya.

Persaingan politik kader merupakan salah satu produk unggulan partai yang menentukan daya saing dan daya jual pada masyarakat, semakin baik pola rekrutmen yang dilakukan partai semakin baik pula kader yang dihasilkan, semakin baik kader yang dihasilkan yang memiliki integritas dan elektabilitas makin tinggi pula tingkat kepercayaan warga pada partai politik hasilnya akan mempengaruhi pada pemilihan karena tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap figur-figur yang akan dipilih merupakan kader terbaik partai yang akan mewakili kepentingan rakyat. Jadi kualitas partai politik di tentukan oleh kualitas kader-kader partai politik namun jauh sebelum itu yang patut diketahui tentang proses nominasi calon diakui penting dan meskipun banyak studi kasus deskriptif terhadap proses rekrutmen calon dalam partai tertentu dan dokumentasi aturan formal partai, relatif sedikit yang diketahui tentang struktur dan dinamika proses itu dalam praktek, atau bagaimana mengapa ini bervariasi antara partai satu dengan partai yang lain. Seperti

yang dikatakan Schattschneider (S. Richard Katz dan William Crotty, 2014:152) proses pencalonan telah menjadi proses penting dalam partai dia yang membuat nominasi adalah pemilik partai.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Partai yang lahir pada 1 Februari 1999 ini merupakan salah satu partai yang berpeluang mengusung calon kepala daerah dari PDI-P dalam pilkada Kabupaten Ketapang pada tahun 2015. Pada umumnya PDI-P dikenal mampu menciptakan kader partai menjadi pemimpin yang berkualitas hal ini, tentu berpengaruh pada kemenangan saat pemilihan seperti ditingkat lokal khususnya Provinsi

Tabel 1.1  
Perolehan Suara Dapil 2 (dua) Pilkada Kabupaten Ketapang Tahun 2010

N O	Nama Pasangan Calon		Jumlah suara Kec. Sungai Laur	Jumlah suara Kec. Simpan g Dua	Jumlah suara Kec. Simpang Hulu
	Kepala Daerah	Wakil Kepala Daerah			
1	2	3	4	5	6
1	Martin Rantan, S	Drs.Supr apto. S	3.077	2001	9.492
2	Drs. H. Andi Djamaru din, M.Si	Chanasiu s Kuan	1.716	923	3.509
3	H. Boyman Harun,	H. Boyman Harun,S	1.798	375	972
4	Ir. H. Darmans yah, MM	Uti Rushan, ST.	1.021	41	475

Sumber data: KPUD Provinsi Kalimantan Barat

Kalimantan Barat PDI-P berhasil mencetak kader yang mampu memenangkan pemilihan gubernur dua priode. Jika kita lihat kebelakang PDI-P mempunyai kekuatan politik di Kabupaten Ketapang hasilnya dilihat pada saat pilkada 2010-2015 PDI-P berhasil memenangkan pasangan Drs. Henrikus, M.Si – H. Boyman Harun, SH.

Tabel 1.2  
Perolehan Suara Dapil 2 (dua) Pilkada Kabupaten Ketapang Tahun 2015

N O	Nama Pasangan Calon		Jumlah suara Kec. Sungai Laur	Jumlah suara Kec. Simpan g Dua	Jumlah suara Kec. Simpan g Hulu
	Kepal a Daera h	Wakil Kepal a Daera h			
1	2	3	4	5	6
1	Yasir Ansh ari	Marti n Ranta n, SH	3.143	534	1.254
2	Drs. Henri kus, M.Si	H. Boym an Harun ,SH.	6.003	3.950	14.932

Sumber data: KPUD Provinsi Kalimantan Barat

Kemenangan ini tentu ingin diteruskan oleh PDI-P pada pilkada 2015 di Kabupaten Ketapang dengan mengusung pasangan Drs. H. Andi Djamarudin, M.Si dan Chanasius Kuan sebagai Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dengan harapan bisa memenangkan pilkada di Kabupaten Ketapang pada tahun 2015 namun hasilnya

pasangan yang di usung partai PDI-P gagal memenangkan persaingan dan hanya memperoleh suara terbanyak kedua dengan jumlah 62.332 suara selisih 2.436 suara dengan pemenang pertama. Kemenangan yang diperoleh pasangan calon kepala daerah oleh PDI-P hanya pada daerah ketapangan bagian selatan atau ketapang bagian kota namun kalah pada Ketapang bagian utara yang tergolong dalam daerah pemilihan (dapil) 2 dan 3 khususnya dapil 2 Kecamatan Simpang Hulu, Simpang Dua dan Kecamatan Sungai Laur. Khususnya Kecamatan Sungai Laur mempunyai jumlah pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap 14.763 namun yang menggunakan hak pilih hanya 8.121 suara dengan jumlah persentase yang tidak menggunakan hak suara 45,19% pemilih, sebagian besar dari pemilih yang tidak menggunakan hak suara beralasan karena mereka tidak mengenal pasangan calon kepala daerah. Jika dilihat pada perolehan pilkada sebelumnya dapil 2 (dua), Kecamatan Sungai Laur menjadi pendulang suara bagi pasangan calon kepala daerah PDI-P seperti yang terdapat pada tabel.

Dari tabel 1.1 terlihat jelas PDI-P mempunyai kekuatan suara di dapil 2 (dua) yang berimbang pada kemenangan pemilihan kepala daerah tahun 2010 namun

sebaliknya yang terjadi pada pilkada 2015 seperti yang terdapat pada tabel;

Dari data tabel 1.2 PDI-P gagal meraih kemenangan pada dapil 2 (dua) khususnya Kecamatan Sungai Laur yang berimbang pada kekalahan PDI-P pada pilkada dengan demikian PDI-P terbilang gagal merekrut calon yang banyak dikenal masyarakat, diterima semua pihak dan mempunyai wawasan yang luas tentang dinamika politik daerah sehingga memungkinkan mampu menjalankan tugas dalam memimpin daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: Pola Rekrutmen Calon Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Ketapang.

## **2. Fokus penelitian**

Agar lingkup dalam pembahasan tidak terlalu meluas hingga keluar dari inti penelitian ini dan atas dasar pemahaman dari uraian latar belakang, maka penulis memfokuskan permasalahan tersebut pada "mekanisme perekrutan oleh PDI-P terhadap Bakal Calon kepala daerah yang akan diusung menjadi Calon Kepala Pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Ketapang".

### **3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah di rumuskan agar penelitian menjadi terarah maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah : Ingin mengetahui pola rekrutmen yang dilakukan partai PDI-P terhadap calon kepala daerah kabupaten ketapang pada tahun 2015

### **4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **1. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan partai politik dalam menjalankan sistem politik yaitu dalam upaya meningkatkan kualitas rekrutmen agar partai bisa melakukan tindakan sebaik mungkin dalam mensleksi kader yang berimplikasi pada kemenangan saat pemilu.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Pertama, Harapan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu politik, khususnya dalam kajian kepartaian, kedua penelitian ini dapat memunculkan argumen-argumen ilmiah terhadap partai yang melakukan rekrutmen.

### **5. Tinjauan Pustaka**

#### **5.1. Pengertian Rekrutmen**

Partai politik tentu terdapat beberapa fungsi penting yang dijalankan partai sebagai sarana dalam mengaplikasikan tujuan mereka, salah satu fungsi partai yang berkaitan dengan hal ini ialah rekrutmen dan setiap partai politik di Indonesia memiliki cara sendiri dalam merekrut kader-kader dalam keanggotaan struktur partai politik. selain itu partai politik merekrut untuk di jadikan dalam keanggota pemerintahan. Partai politik merekrut berdasarkan aturan masing-masing yang dimiliki partai berkaitan dengan perekrutan keanggotaan struktur harian maupun penentuan dalam pencalonan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gabriel Almond (Labolo Muhammad 2015:17) proses rekrutmen merupakan kesempatan rakyat untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui dalam penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri pada jabatan tertentu, pendidikan dan latihan.

Arifin Rahman (1997:70) berpendapat rekrutmen politik dapat diartikan sebagai perselisihan individu-individu yang berbakat untuk dapat menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan dan perekrutan politik menurut beliau dianggap

sebagai hubungan dengan karier seseorang dibidang politik.

Menurut Ranney (Richard. S, 2014:178) seleksi calon adalah proses yang dengannya partai politik memutuskan nama orang-orang yang secara hukum layak memegang jabatan elektif akan dimasukan dalam surat suara dalam komunikasi pemilu sebagai calon atau daftar calon yang direkomendasikan dan didukungnya. Berdasarkan penjelasannya bahwa partai politik mempunyai peranan besar terhadap penentuan calon.

Budiarjo (2008:408) rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi anggota untuk kegiatan regenerasi dari sebuah organisasi, baik partai politik, lembaga pemerintahan maupun organisasi lainnya. Namun, rekrutmen lebih dikenal dengan bahasa politik yaitu proses mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Rekrutmen merupakan bagian dari meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat pada sebuah organisasi serta sebagai regenerasi dari sebuah organisasi tersebut.

## 5.2. Pola Rekrutmen

Betapa sangat krusialnya proses rekrutmen politik dalam menyeleksi calon kepala daerah (cakada) menuju puncak

kepemimpinan di daerah, tahapan ini adalah pintu untuk memilih para kandidat yang diajukan menjadi cakada. Salah satu pertimbangan penting bagi partai politik dalam menentukan cakada, tentu melihat potensi calon tersebut supaya memaksimalkan prolehan suara. Proses rekrutmen calon menjadi tahanan yang di penuh berbagai kepentingan dan intrik internal partai yang pada akhirnya membiasakan pertimbangan potensi calon dan isu prioritas partai. Pada umumnya partai melakukan rekrutmen melalui dua pola yaitu secara terbuka dan tertutup seperti teorinya Rush dan Althoff (Kartono K, 2007:247) rekrutmen politik dibagi menjadi dua cara; *Pertama* rekrutmen terbuka, yakni dengan menyediakan dan memberi kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah di tentukan melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional. *Kedua*, rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk menduduki jabatan politik tidak sama setiap warga artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat menduduki jabatan politik. Sependapat dengan Fadilah Putra (2003:209) terhadap mekanisme rekrutmen politik.

1. Rekrutmen terbuka, syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Cara ini dinilai sangat kompetitif jika di hubungkan dengan paham demokrasi maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat untuk mengontrol legitimasi para elit politik. manfaat yang diharapkan dari proses rekrutmen terbuka adalah

- a. Mekanisme yang demokratis.
- b. Kompetisi politik sangat tinggi, masyarakat akan melihat pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki.
- c. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi.
- d. Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis.

2. Rekrutmen tertutup berlawanan dengan rekrutmen terbuka, dalam rekrutmen tertutup syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang bersal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup

kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya. Rekrutmen politik yang dilakukan partai politik dengan cara terbuka akan memungkinkan lahirnya calon-calon yang betul-betul demokratis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sedangkan sistem tertutup merupakan kebalikannya dimana para pemilih tidak megenal calon, karena sistem pengangkatan calon tersebut dilakukan dengan cara tertutup. Hal ini akan memungkinkan lahirnya calon yang tidak kompetitif, berhubungan proses pengakatan tidak diketahui oleh umum.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada dasarnya penelitian adalah suaru cara untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan, adapun jawaban dari permasalahan tersebut berupa data-data hasil

penelitian yang didapat dari penggunaan metode tertentu. Untuk penapsiran terhadap suatu permasalahan tertentu yang dihadapi seorang peneliti diperluakanya sebuah metode penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dan sering disebut metode penelitian nanturalistik karena dapat di klasifikasikan berdasarkan tingkatan kealamiahannya. Kemudian dibentuk kedalam sebuah penelitian deskriptif dengan melakukan analisi, suatu metode dalam meneliti objek, kondisi, suatu, system pemikiran ataupun peristiwa yang terjadi dimasa sekarang. Seperti menurut Faisal (2002:12) bahwa penelitian deskriptif itu adalah penelitian yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi sekarang ini.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kabupaten ketapang dan Kantor DPC partai PDI-P Kabupaten Ketapang serta Kecamatan Sungai Laur lokasi ini dikarenakan pengamatan peneliti mengenai masalah ini berada di DPC partai PDI-P Kabupaten Ketapang dan Kecamatan Sungai Laur. Pemilihan tempat tentu dengan pertimbangan-pertimbangan bahwasannya

partai PDI-P dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015 tidak berhasil memenangkan perolehan suara di Kabupaten Ketapang khususnya Kecamatan Sungai Laur serta data yang diperluakann dalam penelitian lebih lengkap.

## 3. Subjek dan Objek

Dalam menentukan subjek penelitian peneliti menggunakan teknik *purposive*. menurut Sugiono (2010:56) teknik penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposip sampling*, yaitu sampel ditentukan dengan menunjuk orang-orang selaku sumber data yang memahami, atau pertimbangan tertentu orang tersebut dianggap paling tahu dengan apa yang diharapkan dalam penelitian ini. Untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian yang menjadi subjek penelitian ini adalah.

Tabel 3.2  
Nama Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Kasdi, S.IP	Ketua DPC PDI-P Kab Ketapang
2.	Alfan	Kader PDI-P
3.	Jamhuri Amir, SH	Bakal Calon Kepala Daerah
4.	Lukas	Tokoh Masyarakat

Sumber; diolah oleh penulis

## C. HASIL PEMBAHASAN

### C.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Ketapang adalah salah satu daerah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang berada di bagian utara secara geografis pusat kota terletak terletak di antara garis  $0^{\circ} 19' 00''$  -  $3^{\circ} 05' 00''$  Lintang Selatan dan  $108^{\circ} 42' 00''$  -  $111^{\circ} 16' 00''$  Bujur Timur. Secara administratif batas wilayah Kabupaten Ketapang berbatasan dengan;

Utara : berbatasan dengan Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Sanggau

Selatan: berbatasan dengan Laut Jawa

Timur : berbatasan dengan Selat Karimata dan Laut Jawa

Barat : berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Sintang.

Kabupaten Ketapang sangat strategis, dikatakan demikian karena terhubung langsung dengan lintas laut Jawa sehingga memudahkan transportasi dan mobilisasi barang kebutuhan daerah. Dibandingkan kabupaten lain di Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten terluas, memiliki pantai yang memanjang dari selatan ke utara dan sebagian pantai yang merupakan muara sungai, berupa rawa-rawa terbentang mulai dari Kecamatan Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, dan

Kendawangan sedangkan daerah hulu umumnya berupa daratan yang berbukit-bukit dan diantaranya masih merupakan hutan.

### C.2. Gambaran Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan yang adalah sebuah partai yang resmi terbentuk pada 1 Februari 1999 dan dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Jakarta menempatkan Dyah Permata Megawati Setiawati yang akrab dipanggil Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI perjuangan, partai ini merupakan kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang didirikan pada 10 Januari 1973 nama partai diubah menjadi PDI Perjuangan dengan azas Pancasila dan bercirikan Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Selain nama, PDI Perjuangan juga mengubah logo kepala banteng dalam segi lima menjadi banteng gemuk dalam lingkaran.

Memperkokoh fondasi politik partai diperkuat dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga baru yang menekankan jati diri partai secara lebih terbuka. Dengan tujuan umum partai memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendorong perdamaian dunia sama dengan

pembukaan UUD1945, sementara tujuan khususnya adalah memenangkan pemilu agar PDI Perjuangan memiliki sarana mencapai tujuan umum.

PDI perjuangan menjelma sebagai miniaturnya Indonesia dengan berupaya mendorong adanya kesamaan hak antara warga negara secara utuh tanpa melihat latar belakang dengan semangat ini pada akhirnya PDI Perjuangan menuai hasil memuaskan secara dramatis memenangkan pemilu 1999 dengan perolehan 34 persen atau 36 juta pemilih untuk mempertahankan tren kemenangan hingga akhir 2003, PDI Perjuangan telah memiliki 31 DPD di 31 Provinsi serta 413 cabang di tingkat kabupaten dan 643 kecamatan dengan basis terbesar partai berada di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat

#### **D. PEMBAHASAN**

Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada) bagi partai politik, adalah sebuah pertarungan untuk menentukan nasib partai kedepannya, mencapai kemenangan dalam pilkada tidaklah mudah harus melalui proses cukup panjang. Hal yang diperlukan

partai politik adalah mencari simpatisan dan pendukung demi menyukseskan tujuan partai, jauh sebelum mencari simpatisan partai politik terlebih dahulu mempersiapkan calon kepala daerah yang diusung partai pada saat pilkada baik dari kader partai maupun dari kalangan profesional.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah belajar banyak dari pengalaman ikutsertaanya dalam perhalatan pemilukada partai yang sempat menjadi partai pemerintahan pada masa Kepersidenan Megawati tahun 2001-2004 kemudian menjadi partai di luar pemerintahan (oposisi) pada masa 2004-2014 pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kemudian kembali menjadi partai penguasa pemerintahan berkat kemenangan pada saat pemilu 2014.

Perjalanan panjang ini menjadikan pengalaman berharga bagi partai dalam menyusun strategi pemenagan pemilu, pengalaman itu terbukti dengan kesuksesan yang diraih pada saat pemenagan pemilihan presiden 2014. Namun kemenangan tersebut tidak terlepas dari usaha partai di daerah dengan menciptakan kader-kader berkualitas sebagai pemimpin daerah sehingga mampu memobilisasi massa melalui kinerja dan kebijakan dalam pemerintahan daerah. Kalimantan Barat

mempunyai andil besar bagi PDI-P pada Pemilihan umum presiden yang mengantarkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai pemenang pemilihan umum presiden tahun 2014 yang diusung oleh PDI-P.

Bersertatus partai pemerintahan yang memenangkan pemilu 2014 tentu mempunyai kekuatan basis massa pendukung secara nasional juga akan berpengaruh pada tingkat regional dan daerah. Kalimantan Barat khususnya PDI-P mempunyai kekuatan politik dengan menempatkan kadernya sebagai kepala daerah yang memimpin selama dua periode sejak 2008-2013 dan 2013-2018, jika dilihat ketinggian kabupaten/kota PDI-P mempunyai tren baik di Kabupaten Ketapang dengan mampu memenangkan pemilukada kabupaten pada 2010-2015 berhasil menempatkan kadernya sebagai kepala daerah.

Pemilukada 2015 tentunya PDI-P mengharapkan kemenangan yang diraih pada pemilukada lima tahun lalu dengan demikian pada pemilukada 2015 DPC PDI-P Kabupaten Ketapang mencalonkan kepala daerah yang dinilai cukup berkompeten dengan melalui proses seleksi partai. bagaimanakan sistem pola rekrutmen yang dilakukan DPC PDI-P Kabupaten Ketapang

dalam menetapkan calon apakah penjangkaran terbuka atau sebaliknya dengan sistem tertutup.

bersinergi dengan seluruh pengurus partai dari Pengurus Ranting Partai, Pengurus Anak Cabang (PAC), Dewan Pengurus Cabang (DPC) kemudian dilakukan seleksi oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan seterusnya di tetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Dari beberapa bakal calon yang ditawarkan tentu hanya ada satu pasangan calon yang di tetapkan oleh DPP, itulah calon yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah sebagai calon kepala daerah.

## **1. Rekrutme Kepala Daerah Dengan Sistem Tebuka**

### **1.1. Kesempatan Yang Sama Setiap Warga**

Pola rekrutmen terbuka menurut Rush dan Althoff yang pertama ialah memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menduduki jabatan politik atau pemerintahan dengan mengikuti proses penyeleksian serta memenuhi pesyaratan yang ditentukan oleh partai, Dilakukannya rekrutmen terbuka memberi kesempatan bagi seluruh masyarakat yang mempunyai potensi kemudian ingin mencalonkan sebagai kepala daerah. Tahapan rekrutmen

terbuka yang PDI-P laksanakan dalam proses merekrutmen calon kepala daerah ialah;

### 1.1.1. Tahapan Persiapan

Sebelum pelaksanaan pemilukada partai mempersiapkan segala macam bentuk yang diperlukan pada pemilukada demi mendukung dan mensukseskan pemilukada untuk hasil yang maksimal, tahapan awala yang dilakukan partai ialah seperti yang disampaikan Ketua DPC PDI-P Kabupaten Ketapang Kasdi, S.IP mengenai persiapan DPC PDI-P Kabupaten Ketapang dalam menghadapi pemilukada tahun 2015 sebagai berikut;

“persiapan PDI-P secara umum berdasarkan tahapan yang telah diberikan oleh KPU dan DPP partai PDI-P. Tahapan awala dari KPU tentunya membuka pendaftaran sebelum mendaftar di KPU tahapan awal partai melakukan Rakercabsus partai yang dihadiri seluruh Pengurus Anak cabang, Ketua dan Sekretaris Pengurus Ranting partai dan menginformasikan penjangangan melalui pengurus ranting yang dinilai cukup dekat dengan masyarakat”.

Jadi persiapan awal DPC PDI-P Kabupaten Ketapang sebelum melakukan penjangangan calon, jajaran pengurus DPC PDI-P dilakukannya rapat kordinasi sebagaimana dituangkan dalam Peraturan

Partai Deokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 04 Tahun 2015 Pasal 23 Tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Rakercabsus dihadiri seluruh pengurus partai dari pengurus cabang hingga pengurus ranting partai DPC PDI-P Kabupaten Ketapang yang sesuai dengan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sehingga kegiatan yang dilaksanakan DPC lebih sistematis untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang.

Sebelum Rakercabsus persiapan dilaksanakan Pengurus Anak Cabang yang berada di kecamatan dalam persiapan pemilukada melakukan persiapan seperti yang disampikan Ketua PAC Kecamatan sungai laur Pollo Grossi, SE.

“persiapan sebelum pemilukada kita diintruksikan oleh Ketua harian DPC untuk mensosialisasikan kepada masyrakat mengenai perihal penjangangan yang dilakukan oleh partai supaya PAC mempersiapkan calon dari kader partai maupun non kader untuk dibawa pada Rakercabsus kemudian dilakukannya proses penjangangan disiapkan sebagai calon kepala daerah”

Petugas PAC diintruksikan untuk menginfomasikan dan mensosialisasikan

kepada masyarakat terhadap agenda partai mengenai rekrutmen pencalonan kepala daerah. Masyarakat yang menerima informasi dari PAC ialah Bapak Lukas sebagai tokoh pemuda di Kecamatan Sungai Laur

“pada saat sebelum pilkada kita sempat mendapat informasi bahwa partai PDI-P bakal melakukan pencalonan kepala daerah dan partai memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mempunyai potensi, dan saya rasa masyarakat luas cukup mengetahui informasi tersebut, namun seperti kita ketahui untuk mencalonkan diri dari partai itu bukan hal yang mudah tentu kita harus mempunyai banyak persiapan mental dan materi.

Tahapan persiapan dilakukan dengan sistem dengan mensosialisasikan keseluruhan kader dan masyarakat. Sosialisasi juga bertujuan mengetahui peta politik di masyarakat dalam pemilihan sehingga partai bisa membaca arah politik dan menghimpun aspirasi masyarakat dan disesuaikan ketika pada penyusunan Visi dan Misi calon kemudian dilaksanakan ketika terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, sosialisasi ini dinilai penting karena bagian dari komunikasi partai.

### **1.1.2. Tahapan Penjaringan**

Penjaringan mempunyai peran penting dalam proses rekrutmen politik untuk menciptakan kader-kader yang handal dan berkualitas. Pemilukada 2015 Kabupaten Ketapang DPC PDI-P melakukan penjaringan terhadap bakal calon yang akan diusung sebagai calon melalui partai PDI-P pada pemilukada 2015 Kabupaten Ketapang.

Sesuai dengan yang tercantum dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 11 ayat 3 dan ayat 5 menjelaskan fungsi partai

-Sarana penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

-Sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender,

Serta berdasarkan peraturan KPU Pasal 5;

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling

sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir.

(3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud ayat (2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir.

(4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rumus:

a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir  $\times 20/100$ ; dan

b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir  $\times 25/100$ ; c. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

Partai politik berhak mengusung atau mendukung calon kepala daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan KPU. Setiap partai politik mempunyai

mekanismenya tersendiri dalam merkerut calon kepala daerah seperti yang dilakukan oleh PDI-P yang tertuang dalam peraturan partai. serta KPU mempersilahkan partai politik melakukan kualisi dengan partai lain, hal ini yang dilakukan partai PDI-P dalam pencalonan kepala daerah melakukan kualisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Hanura. Selanjutnya dilakukan perekrutan sesuai dengan konstitusi partai.

Selain dipertegas peraturan KPU proses penjaringan, penjaringan, dan penetapan harus sesuai dengan Peraturan Partai Nomor 4 tahun 2015 seperti disampaikan oleh Ketua DPC PDI-P Kabupaten Ketapang Bapak Kasdi S.IP mengatkan sebagai berikut;

“Sebelum DPP memberikan SK terhadap pasangan calon tahapan awal partai khususnya DPC harus terlebih dahulu melakukan Rakercabsus yang di ikuti oleh seluruh PAC seluruh Kabupaten Ketapang serta ketua dan serketaris Pengurus Ranting seluruh Kabupaten Ketapang yang dilaksanakan pada 26 juli 2015 kemudian calon yang masuk pada tahapan penjaringan akan dilakukan seleksi administrasi oleh pengurus cabang, dari hasil Rakercabsus inilah akan diputuskannya nama-nama bakal calon baik dari internal partai maupun eksternal partai yang telah melauai tahapan

penjaringan akan dilakukan seleksi secara administrasi dengan melakukan verifikasi, verifikasi itu berkaitan dengan semua bidang termasuk loyalitas kepada partai dan dilihat dari pada kemampuan calon tersebut untuk bersaing menarik simpatisan masyarakat, seleksi ini dilakukan oleh pengurus DPC Kabupaten Ketapang kemudian hasilnya diserahkan ke DPD PDI-P Provinsi Kalimantan Barat.

Persiapan menghadapi pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) tahun 2015 sesuai dengan ketetapan partai melakukan penjaringan secara terbuka bertujuan memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan sosialisasi melalui jajaran pengurus DPC PDI-P Kabupaten Ketapang dan media massa agar masyarakat mengetahui proses penjaringan yang dilakukan dengan harapan mencari orang-orang yang potensial dan kompeten untuk dicalonkan sebagai kepala daerah.

Nama-nama yang masuk dalam proses penjaringan dilakukannya tes administrasi oleh pengurus DPC bertujuan menyeleksi kelengkapan administrasi bakal calon untuk dilanjutkan proses penyeleksian di Dewan Pengurus Daerah Provinsi

Kalimantan barat dengan melakukan fit and proper terhadap para calon yang lolos tes administrasi di DPC Kabupaten Ketapang.

Nama yang lolos dari tahapan penjaringan di DPC PDI-P Kabupaten Ketapang yang mengikuti fit and proper yaitu;

Tabel 4.7.  
Bakal Calon Kepala Daerah DPC PDI-P Kabupaten Ketapang Tahun 2015

No	Nama Bakal Calon	Status
1.	Chansius Kuan	Kader Partai
2.	Drs. Hendrikus, M.Si	Kader Partai
3.	Budi Mateus. SH	Kader Partai
4.	Drs. H. Andi Djamarudin,	Profesional
5.	M.Si	Profesional
6.	Jamhuri Amir, SH Lukas Laon	Profesional

Sumber; kantor DPC PDI-P Kabupaten Ketapang

Setelah selesai proses penjaringan ditingkat DPC PDI-P Kabupaten/Kota, DPD PDI-P Provinsi Kalimantan Barat melakukan penyeleksian kader dari seluruh DPC PDI-P Kabupaten/Kota yang mengikuti pemilukada bertempat di hotel Mercure Pontianak, seperti apa proses penyeleksian yang dilakukan oleh DPD Provinsi tersebut, seperti disampaikan Pak Jamhuri Amir, SH, salah satu bakal calon yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dari DPC PDI-P Kabupaten Ketapang.

“kita mengikuti tes yang dilaksanakan oleh DPD PDI-P Provinsi Kalimantan barat, yaitu dengan dimintai persyaratan secara umum selayaknya orang melamar, dari

riwayat hidup organisasi kepemimpinan kesehatan dan yang paling penting ijazah, kemudian dari berkas kita akan dipelajari dan selanjutnya dikirim ke DPP PDI-P.

Pada tahapan proses penjurangan yang dilakukan DPC PDI-P Kabupaten Ketapang telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Partai Nomor 04 tahun 2015 Pasal 14, dengan mekanisme terbuka.

### 1.2.1. Penilaian Objektif dan Rasional

Proses rekrutmen terbuka yang dilakukan partai PDI-P memiliki beberapa pertimbangan terhadap para bakal calon, pertimbangan tersebut berdasarkan penilaian secara objektif dan rasional sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan partai. Proses penilaian ini dilakukan partai pada tahap penyeleksian.

### 1.2.2. Penyeleksian Calon

Proses seleksi calon atau seleksi seseorang untuk menjadi kepala daerah diartikan sebagai rekrutmen politik. rekrutmen sangat penting karena merupakan kelanjutan dari fungsi rekrutmen dilakukannya penilaian terhadap kemampuan seseorang menjadi tolak ukur dalam rekrutmen. Setiap masing-masing partai mempunyai kriteria umum dan khusus untuk mempertlihatkan tujuan dan harapan partai, bahwa calon yang dipilih merupakan

perwakilan partai dan masyarakat akan menjadi cerminan pemimpin nantinya sehingga partai mempunyai kriteria seperti halnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga mempunyai kriteria.

Kriteria umum yang harus dipenuhi;

- Memenuhi kriteria yang diamanahkan undang-undang
- Memiliki kesamaan visi, misi dan ideologi dengan partai
- Memiliki kesiapan dan dukung yang kuat untuk memenangkan pemilihan di daerah pemilihan

Menurut Pak Jamhuri Amir S.H bakal calon kepala daerah

"kriteria *pertama* memenuhi persyaratan administrasi dan tes kesehatan, *kedua* menyamakan visi, misi calon dengan visi, misi partai, *ketiga* memiliki elektabilitas dikalangan masyarakat kenapa saya ingin mencalonkan dan sempat mendapat pinangan dari beberapa calon karena saya pada pemilu tahun 2010 mampu meraih posisi ketiga sebagai wakil bupati dengan modal kampanye seadanya dan pada 2014 kembali naik sebagai anggota DPRD Kabupaten Ketapang melihat hasil itu saya mempunyai dukungan dikalangan masyarakat dan yang melakukan seleksi tersebut adalah mereka dari pengurus DPC.

Pada tahapan seleksi hingga penjurangan PDI-P melakukan dengan sistem terbuka dengan melibatkan pengurus DPC PAC PDI-P Kabupaten ketapang dengan penilaian objektif serta rasional.

### **3.2. Rekrutme Kepala Daerah Dengan Sistem Tertutup**

Sistem rekrutmen tertutup dalam partai politik ialah perekrutan kader atau calon dengan cara tertutup yang hanya diketahui dan ditetapkan oleh pengurus partai bahkan biasanya petinggi-petinggi partai saja. Kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat. Seleksi ini biasanya tanpa ada pengujian terhadap masyarakat mengenai kualitas serta integritas serta pengujian dari tokoh masyarakat terhadap kader tersebut, kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri. Seperti yang terjadi pada partai PDI-P saat proses perekrutan calon kepala daerah Kabupaten Ketapang pada pemilukada 2015.

#### **3.2.1. Tidak Sama Kesempatan Bagi Setiap Warga**

Pada proses rekrutmen tertutup hanya sebagaian orang yang diberi kesempatan untuk menduduki jabat politik mereka yang diberi kesempatan adalah yang mempunyai kelebihan dari segi intelektual, emosional,

dan material serta mempunyai hubungan baik dengan dengan elit partai politik.

Terlepas dari itu semua partai politik dituntut berkerja keras dalam menyeleksi bakal calon yang ditetapkan menjadi calon kepala daerah sehingga mampu memimpin yang menentukan arah kebijakan pemerintahan sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka dari itu dibutuhkannya calon yang tanggap dan militan serta berwawasan sehingga kebijakan yang dikeluarkan sesuai harapan masyarakat. dalam proses penetapan balon yang ditetapkan sebagai calon menurut Ketua DPC PDI-P Kabupaten Ketapang Bapak Kasdi S.IP adalah sebagai berikut;

“yang menetapkan calon kepala daerah adalah DPP pusat, mereka yang telah mengikuti tes di DPD Provinsi Kalimantan Barat, yaitu tes tertulis, tes wawancara, dan tes adminitrasi, dari hasil itu akan diputus nama-nama yang akan dikirim ke DPP Pusat selanjutnya akan ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh partai PDI-P”.

Proses penetapan ini dilakukan dengan sistem tertutup karena hanya pengurus DPD dan DPP yang mengetahui bakal calon yang akan di loloskan menjadi calon kepala daerah. Bagaimana proses seleksi yang dilakukan Bapak Jamhuri Amir

SH. Sebagai salah satu bakal calon kepala daerah dari mengatakan;

“kehadiran kita disana pada saat proses seleksi hanya sebagai pelengkap karena ketua DPD PDI-P telah mempunyai pasangan jadi yaitu pasangan Pak Andi Djamarudin dan Pak Chanasius Kuan yang bakal dikirim ke DPP kemudian ditetapkan sebagai calon kepala daerah”

Hanya individu-individu tertentu yang bakal di sampaikan kader DPC PDIP-P kabupaten ketapang sekaligus Ketua Sekertarian DPC Bapak Alfani yaitu;

“pada proses pencalonan kepala daerah kemaren kenapa pihak DPD dan DPP mencalonkan Pak Andi Djamarudin dan Pak Chanasius Kuan karena mereka pak Andi dinilai telah berbuat banya seperti membuat posko pada saat menjadi relawan kemengan Jokowi pada saat pemilihan presiden 2014 serta telah banyak membiayai pertemuan-pertemuan partai”.

Rekrutmen yang seperti ini tentu telah menciderai proses demokrasi dalam partai yang mengakibatkan calon kurang berkompeten. Dari pernyataan kader dan salah satu bakal calon tersebut menjelaskan bahwa partai melakukan sitem rekrutmen tertutup terhadap bakal calon karena telah memilih salah satu pasangan calon tanpa mempertimbangkan elektabilitas calon

tersebut, serta besarnya pengaruh elit partai dalam menentukan pasangan calon.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis menganalisa pola rekrutmen PDIP pada pilkada 2015 Kabupaten Ketapang mencakup tiga indikator;

1. Partai PDI-P melakukan penjangaran secara terbuka dengan dengan melibatkan seluruh kader dan non kader serta memberikan kesempatan kepada seluruh warga untuk terlibat pada proses penjangaran, sebagai mana menjadi fungsi partai politik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menduduki suatu jabatan politik.
2. Pada proses penyaringan bakal calon dan penetapan calon kepala daerah partai PDI-P melakukan dengan sistem tertutup dengan memberi kesempatan kepada individu-individu tertentu dan hanya melibatkan elit pengurus DPD dan DPP.

Jadi berdasarkan penelitian yang telah dibahas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut;

Pola rekrutmen yang dilakukan DPC PDIP Kabupaten Ketapang pada proses penjangaran sesuai dengan teori yang penulis

gunakan Rush dan Althoff tentang rekrutmen terbuka proses penjangkaran berlangsung dari tingkat terbawah seperti Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Cabang. Namun proses penyaringan dan penetapan dilakukan dengan sistem tertutup, hanya individu tertentu dan elit-elit partai yang terlibat dalam proses penetapan tersebut. Maka dengan demikian penulis menyimpulkan rekrutmen yang dilakukan oleh PDI-P adalah tertutup.

#### E. SARAN

Saran yang dapat dikemukakan penulis dalam hasil penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mekanisme penyaringan dan penetapan bakal calon menjadi calon seharusnya DPC Kabupaten Ketapang ikut mengetahui sehingga bisa mengontrol keputusan yang diambil. Karena dikhawatirkan terjadi kecurangan *money politic* dimana proses penetapan calon bisa dilancarkan dengan *money politic*.
2. Harapan setelah rekrutmen berlangsung partai lebih giat melakukan pendidikan politik terhadap para kader melalui pelatihan-pelatihan tentang

kepemimpinan yang diterjukkan langsung kepada masyarakat agar mereka bisa langsung menampung aspirasi masyarakat untuk dijadikan kebijakan ketika memimpin nantinya.

#### F. REFERENSI

Alfan M Alfian. 2009. *Menjadi pemimpin Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Amirudin dan Ahmad Zaini Bisri. 2005. *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Budiharjo Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

\_\_\_\_\_. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia

Fadilah Putra. 2003. *Partai Politik Dan Kebijakan Politik*. Bandung: CV Pustaka Setia

Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor

Fokusmedia. 2014. *Undang-Undang dan Perpu Pilkada dan Pemda*. Bandung: Indonesia

Kantaprawira, Rusandi. 2004. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Kartini Kartono. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Litbang Kompas. 2004. *Partai Politik di Indonesia Ideologi dan Program*. Jakarta : Kompas

Labolo Muhammad dan Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsef, dan Isu Strategis*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada

Marsh David dan Stoker Gerry. 2012. *Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media

Moleong Lexy. J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rodakarya

Nurhasim, Moch. 2005. *Konflik Antar Elit Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, Yogyakarta*.

Prihatmoko Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Purwoko Bambang. 2005. *Isu-Isu Strategis Pilkada Langsung Ekspresi Kedaulatan Untuk Kesejahteraan*. Jurnal Ilmu Politik dan pembangunan. Labolaturium Ilmu Politik Fisip Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto.

Rahman Arifin. 1997. *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: PENERBIT SIC

Rahman Arifin. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Subakti Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv Alfabeta

S. Richard Katz dan William Crotty. 2014. *Handbook Partai Politik*. Bandung : Nusa Media

Upe, Ambo. 2008. *Sosiologi Politik Kontemporer*. Jakarta: Prestasi Pustaka  
**Skripsi**

Arry Simon Anggiawan. 2015. *Pola Rekrutmen Calon Legislatif Partai Bulan Bintang Pada Pemilihan Legislatif di Kabupaten Sekadau Tahun 2014*. Universitas Tanjungpura Pontiank

Adi Akbar, Guna. 2014. *Rekrutmen Perempuan Pada Partai Golongan Karya (Golkar) Sebagai Calon Anggota Legislatif Tahun 2009-2014 di Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat*. Universitas Tanjungpura Pontianak

Setiawan Ade. 2015. *Pola Rekrutmen Calon Legislatif Partai Nasional Demokrasi Pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kota Pontianak*. Universitas Tanjungpura Pontianak

#### **Tesis**

Saragih Parulian. 2012. *Pengaruh Politik Uang Dalam Pemilukada Untuk Terpilihnya Pemimpin Yang Berintegritas Suatu Studi Di Kabupaten Ketapang*. Universitas Tanjungpura.

#### **Rujukan Elektronik**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Partai\\_Demokrasi\\_Indonesia\\_Perjuangan#Latar\\_belakang](https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuangan#Latar_belakang)



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : OSKAR IRWANI  
 NIM / Periode lulus : E.02112021 / 2016-2017  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / IA  
 E-mail address/ HP : OSKARIRWANI@gmail.com / 085245916262

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa \*) pada Program Studi ILMU... POLITIK..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

POLA KEKUTIMEN KEPALA DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
 PERJUANGAN CPDIP) PADA PILKADA TAHUN 2015 DI KABUPATEN KEPAPANG.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Menyetujui/ disetujui  
 Pengelola Jurnal Publik  
 DR. MUFIKRI N. M.S.  
 NIP. 08102002122002

Dibuat di : PONTIANAK  
 Pada tanggal : 22 - NOVEMBER 2016  
 OSKAR IRWANI  
 NIM. E02112021

Catatan :  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)